

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu

Pada zaman prasejarah, daerah Bengkulu diperkirakan sudah dihuni oleh manusia. Para pendatang dari Asia berbaur dengan manusia purba sekitar 4000 – 2000 SM. Sebagian masuk ke pedalaman, sementara yang lain menghuni daerah pantai. Penyebaran manusia tersebut merupakan cikal bakal Suku Bangsa Neo-Malayan. Beberapa suku bangsa itu antara lain: Suku Rejang (Rejang Lebong dan Bengkulu Utara), Suku Serawai atau Pasemah (Bengkulu Selatan), Suku Kaur (Bintuhan), Suku Lembak di Kota Bengkulu dan sekitar Kota Curup). Bengkulu (Kota Bengkulu) dan suku Katahun (Muko-muko). Beberapa bukti dari masa prasejarah menunjukkan bahwa Bengkulu pernah dihuni oleh manusia prasejarah yang memiliki kebudayaan dan tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah tradisi pemujaan terhadap batu-batu besar sebagai perwujudan dari roh nenek moyang. Batu-batu besar yang menunjukkan tradisi megalitik di Bengkulu hingga kini dapat diamati di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Kota Bengkulu resmi menjadi Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 November 1968.⁶⁸

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Jakarta, 1977/1978), h. 21.

Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (dari tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang dan pada masa Revolusi fisik, daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukkan kedalam Keresidenan Palembang dan Lampung. Perkembangan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.

5. Tahun 1968, daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur.
6. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.
7. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang

Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.⁶⁹

B. Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Bengkulu dibentuk setelah Provinsi Bengkulu resmi didirikan. Sekretariat daerah Bengkulu adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung administrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu. Sekretariat daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan daerah. Pendirian Sekretariat Daerah di Provinsi Bengkulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Setelah Provinsi Bengkulu didirikan salah satu lembaga yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas administratif pemerintahan adalah Sekretariat Daerah (SETDA). Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu bertugas untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, dan koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat provinsi. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu didirikan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintah daerah

⁶⁹ J Pebrian, *Profil dan sejarah Provinsi Bengkulu*, pada hari jumat, tanggal 02-02-2018, pukul 21.13 WIB.

dan menjalankan fungsi administrasi yang mendukung keberlangsungan tugas-tugas Pemerintahan.⁷⁰

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

NO	Biro	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19	56	75
2	Biro hukum	29	18	47
3	Biro Perekonomian	17	31	51
4	Biro Administrasi Pembangunan	44	27	71
5	Biro Organisasi	19	28	47
6	Biro Umum	82	52	134
	JUMLAH	210	212	425

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

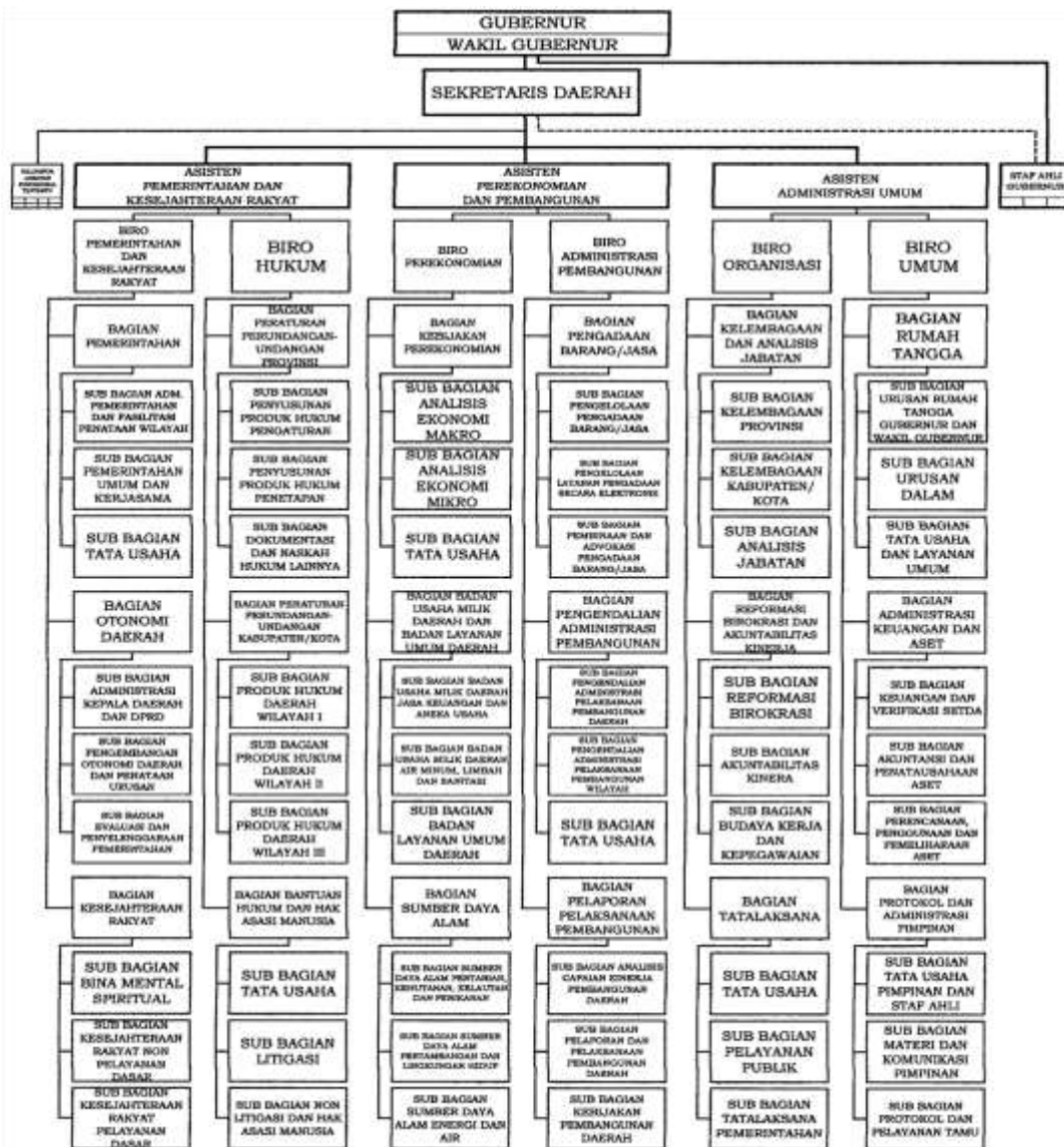
Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

- 1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

⁷⁰ Agung Prima Sakti, *Sejarah Kota Bengkulu*, [https://id.scribd.com/doc/43700704/sejarah-berdirinya-kota Bengkulu](https://id.scribd.com/doc/43700704/sejarah-berdirinya-kota-Bengkulu).

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.⁷¹

C. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi



Sumber: Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

⁷¹ Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.